

BALAI RISET PERIKANAN LAUT

LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 31 DESEMBER 2024



A PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Riset Perikanan Laut adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Riset Perikanan Laut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Riset Perikanan Laut. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Jakarta, 31 Desember 2024

Kepala Balai,

Luthfi Assadad, S.Pi, M.Sc
NIP. 19851121 200901 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	30
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	42
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	50
F. Pengungkapan Penting Lainnya	54
VI. Lampiran dan Daftar	55
PENUTUP	59



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PERIKANAN LAUT**

KOMPLEK BINA SAMUDERA JALAN PASIR PUTIH I, ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
LAMAN : brpl.kkp.go.id POS ELEKTRONIK : brpl@kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Riset Perikanan Laut yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Jakarta, 31 Desember 2024

Kepala Balai,

Luthfi Assadad, S.Pi, M.Sc
NIP. 19851121 200901 1 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Riset Perikanan Laut Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah, senilai Rp23.904.750,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah senilai Rp5.183.915.276,00 atau mencapai 97% dari alokasi anggaran senilai Rp5.316.946.000,00 dimana terdapat blokir anggaran Automatic Adjustment sebesar Rp.125.000.000,00. Apabila pagu anggaran dikurangi dengan anggaran yang diblokir maka persentase realisasi belanja hingga akhir tahun adalah sebesar 99,9%

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan senilai Rp2.671.968.494,00 yang terdiri dari: Aset Lancar senilai Rp0,00; Aset Tetap (neto) senilai Rp2.563.368.910,00; dan Aset Lainnya (netto) senilai Rp108.599.584,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing senilai 0,00 dan Rp2.671.968.494,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp11.075.000,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah senilai Rp5.262.967.140,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp5.251.892.140,00) Surplus Kegiatan Non Operasional dan Surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing senilai Rp12.829.750,00 dan senilai Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO senilai (Rp5.239.062.390,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2024 adalah Senilai Rp2.800.020.358,00 dikurangi Defisit-LO senilai (Rp5.239.062.390,00) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp49.000.000,00 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp5.160.010.526,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp2.671.968.494,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI RISET PERIKANAN LAUT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024			%	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI di atas (Di Bawah)		REALISASI
PENDAPATAN						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	23.904.750	23.904.750	100,00	84.927.021
JUMLAH PENDAPATAN		-	23.904.750	23.904.750	100,00	84.927.021
BELANJA	B.2.					
Belanja Pegawai	B.3	3.276.185.000	3.274.350.762	1.834.238	99,94	3.089.284.937
Belanja Barang	B.4	2.040.761.000	1.909.564.514	131.196.486	93,57	2.518.864.393
Belanja Modal	B.5	-	-	-	-	194.500.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		5.316.946.000	5.183.915.276	133.030.724	97,50	5.802.649.330

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BALAI RISET PERIKANAN LAUT
NERACA
PER 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	978.285.000	978.285.000
Peralatan dan Mesin	C.15	18.282.703.850	18.853.509.550
Gedung dan Bangunan	C.16	1.214.686.000	1.214.686.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	306.529.880	306.529.880
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	8.000.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(18.218.835.820)	(18.536.681.526)
Jumlah Aset Tetap		2.563.368.910	2.824.328.904
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	629.773.700	119.462.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(521.174.116)	(14.146.812)
Jumlah Aset Lainnya		108.599.584	105.315.188
JUMLAH ASET		2.671.968.494	2.929.644.092
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	2.671.968.494	2.929.644.092
JUMLAH EKUITAS		2.671.968.494	2.929.644.092
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.671.968.494	2.929.644.092

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI RISET PERIKANAN LAUT

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	11.075.000	38.400.000
JUMLAH PENDAPATAN		11.075.000	38.400.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3.274.350.762	3.089.284.937
Beban Persediaan	D.3	70.850.626	63.494.490
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.220.529.179	1.795.195.585
Beban Pemeliharaan	D.5	395.073.348	362.989.180
Beban Perjalanan Dinas	D.6	174.111.361	297.185.138
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	128.051.864	633.864.565
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		5.262.967.140	6.242.013.895
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5.251.892.140)	(6.203.613.895)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Pendapatan Pelepasan Aset Non lancar		11.625.000	45.088.499
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.204.750	72
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON		12.829.750	45.088.571
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(5.239.062.390)	(6.158.525.324)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(5.239.062.390)	(6.158.525.324)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BALAI RISET PERIKANAN LAUT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	2.800.020.358	8.264.793.466
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(5.239.062.390)	(6.286.577.190)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN			
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.3	(49.000.000)	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.4	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5		7.192
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	5.160.010.526	821.796.890
EKUITAS AKHIR	E.6	2.671.968.494	2.800.020.358

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Riset Perikanan Laut

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

Balai Riset Perikanan Laut (BRPL) merupakan salah satu unit kerja teknis dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mempunyai mandat utama untuk menyediakan data dan informasi mengenai kajian stok sumberdaya perikanan laut di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) serta memberikan bahan dasar kebijakan dalam pemanfaatan perikanan laut yang berkelanjutan, sebagai pelaksanaan amanat Pasal 7 UU Nomor 45 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 76/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Balai Riset Perikanan Laut.

Pelaksanaan kegiatan di BRPL di tahun 2024 masih dipengaruhi dengan belum selesainya proses pembentukan organisasi baru di lingkungan BPPSDM-KP, pasca adanya kebijakan penghapusan tugas dan fungsi riset di semua kementerian/lembaga. Faktor ini menimbulkan akibat belum maksimalnya fungsi layanan dukungan manajemen internal yang dilakukan di BRPL di tahun 2024. Kondisi ini berdampak pada tingginya tingkat kehati-hatian BRPL dalam melakukan pengelolaan kegiatan dan anggaran sehingga berdampak pada belum maksimalnya kinerja outcome BRPL sampai dengan berakhirnya tahun 2024. Penyesuaian strategi dan arah kebijakan penggunaan anggaran terus dilakukan oleh BRPL sambil mencermati dinamika yang terjadi dalam proses penetapan organisasi

baru. Kegiatan riset sebagai fungsi utama Balai Riset Perikanan Laut sudah dipindahkan ke BRIN yang diikuti pengalihan SDM peneliti ke BRIN, sehingga saat ini BRPL menjalankan tugas dalam bidang dukungan manajemen dan operasional perkantoran

Mengacu kepada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 205 tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, BRPL memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 5.990.158.000,- (sesuai surat pengesahan DIPA BRPL nomor SP DIPA-032.12.2.403822/2024 tanggal 24 November 2023). Kemudian setelah mengalami 10 tahapan revisi sehingga anggaran BRPL menjadi sebesar Rp. 5.316.946.000, dengan pagu aktif sebesar Rp. 5.191.946.000 (karena terdapat pagu blokir Automatic Adjustmen sebesar Rp. 125.000.000)

Realisasi anggaran hingga 31 Desember 2024 adalah senilai Rp. 5.183.915.276,00 (97%) dengan rincian realisasi dikelompokkan kedalam 2 jenis belanja yaitu, realisasi belanja barang sebesar Rp. 1.909.564.514,00 atau sebesar 94,% dari pagu anggaran belanja barang, realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 3.274.350.762,00 atau sebesar 99,9% dari Pagu Belanja Pegawai. Adapun untuk realisasi fisik kegiatan yang terdistribusi kedalam 7 output kegiatan dengan capaian mencapai 100%.

Pendekatan

Penyusunan

Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Riset Perikanan Laut. Laporan Keuangan ini

dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI terdiri atas SAKTI online dan SAKTI offline, yang menggunakan sistem single entry point, single database, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, unaudited dan audited.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut:

Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu

modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara,

modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.

Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Balai Riset Perikanan Laut menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Riset Perikanan Laut dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat Senilai pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau Senilai nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat Senilai nilai wajar sumber daya ekonomi yang

digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Riset Perikanan Laut. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Riset Perikanan Laut adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan Senilai nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat Senilai nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas

kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan Aset
Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat

Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan Senilai nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan Senilai nilai tercatat neto yaitu Senilai harga perolehan setelah

dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2022 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan Senilai nilai buku yaitu harga perolehan

dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat Senilai nilai nominal, yaitu Senilai nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan

Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Riset Perikanan Laut ada revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sebanyak 10 kali dari DIPA awal. Dengan Rincian Sebagai Berikut:

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	3.528.425.000	3.276.185.000
Belanja Barang	2.461.913.000	2.040.761.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	5.990.338.000	5.316.946.000

Penjelasan atas revisi dipa dijelaskan pada pengungkapan lain-lain

*Realisasi
Pendapatan
Rp84,927,021,00*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan TA 2024 mengalami penurunan (71,9%) dibandingkan TA 2023. Realisasi pendapatan TA 2024 Senilai Rp23.904.750,00 berasal dari pendapatan penjualan hasil pertanian, Perkebunan, peternakan dan perikanan (425112) Senilai Rp600.000,00 , Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122) Senilai Rp11.625.000,00, penerimaan Kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu senilai Rp. 1.204.750,00 dan pendapatan dari penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi senilai Rp10.475.000,00

Perbandingan Realisasi Pendapatan Periode 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Negara Bukan Pajak	23.904.750	84.927.021	(71,9)
Jumlah	23.904.750	84.927.021	(71,9)

Dengan Rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	AKUN	NTPN	NTB	Nilai	Keterangan
1	Pendapatan dari Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	425112	D8F9F55DF9LGLFNK	653858790532	600.000	Penjualan bibit rumput laut kegiatan SFV di Pulau Kongsu
2	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	425122	1022B1JNFVEF71CA	1022B1JNFVEF71CA	11.625.000	Penyewaan Alat Eks Riset
3	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tusi	425151	39FD53CIFJRJHQ21	773244501734	25.000	Penyewaan Alat Eks Riset
4	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tusi	425151	7F53555DF98R0HSG	000000100974	700.000	Penyewaan Alat Eks Riset
5	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tusi	425151	7AE771JNFV2S5PT5	240522876844	3.250.000	Penyewaan Alat Eks Riset
6	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tusi	425151	D516E55DF9R09LCA	405642690120	6.500.000	Penyewaan Alat Eks Riset
7	Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	425911	3DAAF0NA047B2BHV	000000335743	1.204.750	Pengembalian kelebihan pembayaran uang makan bulan Desember 2023
Total Pendapatan					23.904.750	

*Realisasi Belanja
Negara
Rp5.183.915.975,00*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp5.183.915.975,00 atau 97.50% dari pagu anggaran belanja sebesar Rp5.316.946.000,00. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.125.000.000,00 yang di blokir Automatic Adjustment hingga akhir tahun anggaran. Jika dikurangi blokir anggaran tersebut realisasi anggaran BRPL hingga akhir tahun anggaran adalah 99,85% Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Per 31 Desember 2024

Uraian	Per 31 Desember 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3.276.185.000	3.274.351.461	99,94
Belanja Barang	2.040.761.000	1.909.564.514	93,57
Belanja Modal			-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	5.316.946.000	5.183.915.975	97,50
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	5.316.946.000	5.183.915.975	97,50

Belanja Pegawai
Rp3.274.351.461,00

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.274.351.461,00 dan Rp3.089284.937,00. Belanja Pegawai Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 6,6% dibanding tahun 2023. Kenaikan realisasi belanja pegawai ini disebabkan karena penambahan 1 orang pegawai PPPK di terhitung sejak Oktober 2023.

Perbandingan Belanja Pegawai Periode 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.726.402.623	1.691.695.417	2,0
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	1.534.086.139	1.387.912.520	9,5
Belanja Lembur	13.862.000	9.677.000	30,2
Jumlah Belanja Kotor	3.274.350.762	3.089.284.937	5,7
Pengembalian Belanja Pegawai	699	(31.886.335)	-
Jumlah Belanja	3.274.351.461	3.057.398.602	6,6

Belanja Barang
Rp2.518.864.393,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.909.564.514,00 dan Rp2.518.864.393,00. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami penurunan sebesar 24,2% dari Realisasi TA 2023. Penurunan disebabkan oleh pengurangan beban belanja gaji PPNP ABK KR Bawal Putih yang dilimpahkan ke BPPP Ambon terhitung mulai Januari 2024.

Perbandingan Belanja Barang Periode 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	569.094.553	1.553.211.333	(63,36)
Belanja Barang Non Operasional	128.615.700	115.489.000	11,37
Belanja Jasa	571.818.926	126.495.252	(62,97)
Belanja Pemeliharaan	419.088.348	384.281.300	9,06
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	174.111.361	297.700.563	(41,51)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Belanja Barang Persediaan	46.835.626	42.202.370	10,98
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1.909.564.514	2.519.379.818	(24,20)
Pengembalian Belanja		515.425	-
Jumlah Belanja	1.909.564.514	2.518.864.393	(24,19)

Belanja Modal
Rp0,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp. 194.500.000,00. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Untuk tahun 2024 tidak terdapat alokasi belanja modal di BRPL.

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal	0	194.500.000	100,00
Jumlah Belanja	0	0	100,00

*Belanja Modal
Tanah Rp.0,00*

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Tidak ada transaksi.

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin Rp0,00*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tidak ada transaksi.

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp.0,00*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tidak ada transaksi.

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp.0,00*

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak ada transaksi.

*Belanja Modal
Lainnya Rp0,00*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Tidak ada transaksi.

*Belanja Bantuan
Sosial Rp0,00*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Tidak ada transaksi.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Senilai 0,00 dan Rp0,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Periode 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Keterangan	TA 2024	TA 2023
Uang Tunai	-	-
Bank	-	-
Kwitansi UP yang belum di SPM GU	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0,00

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Senilai masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Periode 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Keterangan	TA 2024	TA 2023
Uang Tunai	-	-
Bank	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp0,00

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2022 masing-masing Senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Periode Periode 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2022*

Keterangan	TA 2023	TA 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

Piutang PNBPNP Rp0,00

C.4 Piutang PNBPNP

Saldo Piutang PNBPNP per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah Senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat Piutang PNBPNP pada TA 2024 maupun TA 2023. Rincian Piutang PNBPNP disajikan disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang PNBPNP Periode Periode 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023*

Uraian	TA 2024	TA 2023
Piutang PNBPNP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0,00*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR Periode Periode 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

No	Nama	TA 2024	TA 2023
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
Jumlah		-	-

*Bagian Lancar TPA
Rp0,00*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah Senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TPA Periode Periode 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023*

No	Nama	TA 2024	TA 2023
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih – Piutang
Lancar
Rp0,00*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar
Periode Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja Dibayar di Muka Rp0,00

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah Senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak Ada Belanja Dibayar di muka pada TA 2024 dan TA 2023. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka Periode Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Jenis	TA 2023	TA 2023
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0,00

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah Senilai Rp0,00 dan Rp0,00 Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada TA 2024 dan TA 2023.

Persediaan Rp0,00

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah Senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Persediaan Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Jenis	TA 2024	TA 2023
Barang Konsumsi	-	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Tidak terdapat Barang persedian per 31 Desember 2024

Tagihan TP/TGR
Rp0,00

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing Senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Debitur	TA 2024	TA 2023
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
Jumlah		-	-

Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0,00

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Debitur	TA 2024	TA 2023
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
Rp0,00

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak ada Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR pada TA 2024 dan TA 2023.

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA
2024*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.0%	-
Kurang Lancar	-	0.0%	-
Diragukan	-	0.0%	-
Macet	-	0.0%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0.0%	-
Kurang Lancar	-	0.0%	-
Diragukan		0.0%	-
Macet		0.0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah

Rp978.285.000,00

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Riset Perikanan Laut per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Senilai Rp978.285.000,00 dan Rp978.285.000,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2024

No	Luas	Lokasi	Nilai Awal	Koreksi Nilai / Revaluasi Aset	Nilai Sekarang
1	1.130 m2	Pulau Kongs, Kepulauan Seribu	238,430,000	310,140,000	548,570,000
2	859 m2	Pulau Kongs, Kepulauan Seribu	181,249,000	248,466,000	429,715,000
Jumlah			419,679,000	558,606,000	978,285,000

Peralatan dan Mesin

Rp18.282.703.850,00

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp18.282.703.850,00 dan Rp18.853.509.550,00. Nilai Peralatan dan Mesin serta mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	18.853.509.550
Mutasi Bertambah:	19.773.000
Reklas Aset	19.773.000
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi Berkurang:	590.578.700
Transfer Keluar	85.250.000
Penghentian dari penggunaan	505.328.700
Saldo per 31 Desember 2024	18.282.703.850
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-17.948.883.136
Nilai Buku per 31 Desember 2023	333.820.714

*Gedung dan
Bangunan
Rp1.214.686.000,00*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp1.214.686.000,00 dan Rp1.214.686.000,00. Tidak ada mutasi penambahan maupun pengurangan atas aset tetap untuk Tahun 2024, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	1.214.686.000
Mutasi tambah:	184.898.000
Reklas Aset	184.898.000
Transfer Masuk	(184.898.000)
Mutasi kurang:	(184.898.000)
Saldo per 31 Desember 2024	1.214.686.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(174.578.196)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	1.040.107.804

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi
Rp306.529.880,00*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Senilai Rp306.529.880,00 dan Rp306.529.880,00. Sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	306.529.880
Mutasi tambah:	49.000.000
Pembelian	49.000.000
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	-
Transfer Keluar	49.000.000
Reklas Keluar	49.000.000
Penghentian Penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2024	306.529.880
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(95.374.488)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	211.155.392

*Aset Tetap Lainnya
Rp0,00*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0,00 dan Rp8.000.000,00. Sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	8.000.000
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	(8.000.000,00)
Penghentian Penggunaan	(8.000.000,00)
Saldo per 31 Desember 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	0

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0,00*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Tidak Terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp18.740.009.936,00)*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing (Rp18.740.009.936,00) dan (Rp18.536.681.526,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk

Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Periode 31 Desember 2024

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	978.285.000	-	978.285.000
	Peralatan dan Mesin	18.282.703.850	(17.948.883.136)	333.820.714
2	Gedung dan Bangunan	1.214.686.000	(174.578.196)	1.040.107.804
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	306.529.880	(95.374.488)	211.155.392
4	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	629.773.700	(521.174.116)	108.599.584
Akumulasi Penyusutan		21.411.978.430	-18.740.009.936	2.671.968.494

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak Berwujud
Rp0,00

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Pada Tahun 2022 menurut SK Menteri Kelautan dan Perikanan rekomendasi teknologi tidak termasuk ke dalam Aset Tak Berwujud untuk Tahun 2024, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Aset Lain-Lain
Rp629.773.700,00

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp629.773.700,00 dan

Rp119.462.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Disajikan pada tabel berikut:

Saldo per 1 Januari 2024	119.462.000
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	510.311.700
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2024	629.773.700
Akumulasi Penyusutan	(521.174.116)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	108.599.584

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp521.174.116,00)*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah (Rp521.174.116,00) dan (Rp17.290.548,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Lain-lain	629.773.700	-521.174.116	108.599.584
Jumlah	629.773.700	-521.174.116	108.599.584

Uang Muka dari KPPN
Rp0,00

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing Senilai 0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024.

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp0,00

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Balai Riset Perikanan Laut per 31 Desember 2024 tidak mempunyai Utang Kepada Pihak Ketiga.

Pendapatan Diterima
di Muka
Rp0,00

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat Pendapatan Diterima di Muka pada Balai Riset Perikanan Laut.

Beban yang Masih
Harus Dibayar
Rp0,00

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 Senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak Terdapat Beban yang Masih Harus di Bayar per 31 Desember 2024.

Ekuitas
Rp2.928.072.224,00

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.671.968.494,00. dan Rp2.800.020.358,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan

kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNB
Rp22.700.000,00

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai Rp22.700.000,00 dan Rp38.400.000,00. Pendapatan tersebut berasal dari penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi serta pendapatan dari penjualan hasil pertanian, perkebunan dan peternakan.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Periode 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	22.700.000	38.400.000	59,11
Jumlah	22.700.000	38.400.000	59

Beban Pegawai
Rp3.724.350.762,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.724.350.762,00 dan Rp3.089.284.937,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Periode 31 Desember 2024 dan 2022

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan	1.726.402.623	1.691.695.417	2,05
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1.534.086.139	1.387.912.520	10,53
Beban Lembur	13.862.000	9.677.000	43,25
Jumlah	3.274.350.762	3.089.284.937	5,99

*Beban Persediaan
Rp70.850.626,00*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp70.850.626,00 dan Rp63.494.490,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk Periode 31 Desember 2024 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Periode 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	49.035.626	19.896.059	(146,46)
Beban Persediaan Bahan Baku	21.815.000	43.598.431	49,96
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	70.850.626	63.494.490	10,38

*Beban Barang dan
Jasa
Rp1.220.529.179,00*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.220.529.179,00 dan Rp3.089.284.937,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan

kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Periode 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	423.182.673	1.337.984.033	(68,37)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	11.932.000	13.908.000	(14,21)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	318.000	1.088.000	100,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	73.272.000	117.010.000	(37,38)
Beban Barang Operasional Lainnya	60.389.880	83.221.300	(27,43)
Beban Gedung dan Bangunan Ekstrakomtable	24.900.000	-	#DIV/0!
Beban Peralatan dan Mesin Ekstrakomtable	54.715.700	115.489.000	100,00
Beban Honor Output Kegiatan	-	-	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	-	-
Beban langganan Listrik	-	32.233.546	(100,00)
Beban langganan Telepon	-	-	-
Beban langganan Air	-	-	-
Beban Langganan Daya dan jasa Lainnya	151.395.316	39.756.256	280,81
Beban Sewa	-	-	-
Beban Jasa Profesi	-	-	-
Beban Jasa Lainnya	420.423.610	54.505.450	671,34
Belanja Modal	-	-	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah	1.220.529.179	1.795.195.585	(32,01)

*Beban Pemeliharaan
Rp395.073.348,00*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp395.073.348,00 dan Rp362.989.180,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Periode 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	157.700.503	115.000.000	37,13
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	237.372.845	244.671.300	(2,98)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan		3.317.880	(100,00)
Beban Persediaan Suku Cadang			
Jumlah	395.073.348	362.989.180	8,84

Beban Perjalanan

Dinas

Rp174.111.361,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp174.111.361,00 dan Rp297.185.138,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Periode 31 Desember 2024 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Periode 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	142.672.907	188.190.681	(24,19)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.550.000	5.400.000	(34,26)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.040.000	9.010.000	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	23.848.454	94.584.457	(74,79)
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	-	-	-
Jumlah	174.111.361	297.185.138	(41,41)

Beban Barang untuk

Diserahkan kepada

Masyarakat

Rp0,00

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai 0,00 dan Rp0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada

masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Periode 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Bantuan Sosial Rp0,00

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Periode 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp128.051.864,00

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.128.051.864,00 dan

Rp633.864.565,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Periode 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	108.560.356	614.373.057	(82,33)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.004.638	14.004.638	-
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.944.766	1.944.766	-
Beban Penyusutan Irigasi	1.970.236	1.970.236	-
Beban Penyusutan Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	1.571.868	1.571.868	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	128.051.864	633.864.565	(79,80)

*Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0,00*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Periode 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	-	7.192	(100)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	-	-	-
Jumlah	-	7.192	-

*Surplus/(Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp12.829.750,00*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing masing senilai Rp12.829.750,00 dan Rp45.088.571,00. Rincian beban surplus/defisit dari kegiatan non operasional tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional Periode 31 Desember
2024 dan 2023*

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	11.625.000	45.088.499	(74)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	1.204.750	72	1.673.164
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	12.829.750	45.088.571	(71,55)

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

*Pos Luar Biasa
Rp0,00*

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Pos Luar Biasa Periode 31 Desember 2024 dan
2023*

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN)
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI RISET PERIKANAN LAUT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember
2024 dan 2023**

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	2.800.020.358	8.264.793.466
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(5.239.062.390)	(6.286.577.190)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.4	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	(49.000.000)	7.192
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	5.160.010.526	821.796.890
EKUITAS AKHIR	E.6	2.671.968.494	2.800.020.358

Ekuitas Awal
Rp2.800.020.358,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing Senilai Rp2.800.020.358,00 dan Rp8.264.793.466,00

Surplus (Defisit) LO
(Rp5.239.062.390,00)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp5.239.062.390,00) dan (Rp6.286.577.190,00) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0,00

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0,00*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0,00*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi Rp0,00*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Senilai Rp0,00 dan Rp0,00 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2024

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Tanah	-
Gedung dan Bangunan	-
Jalan dan Jembatan	-
Irigasi	-
Aset Tak Berwujud	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain
Rp0,00

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Senilai Rp0,00 dan Rp0,00 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi Antar
Entitas
Rp5.160.010.526,00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.160.010.526,00 dan Rp821.796.890,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL). antar KL. antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(23.904.750)
Ditagikan ke Entitas Lain	5.183.915.276
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	5.160.010.526

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL Senilai (Rp23.904.750,00) sedangkan DKEL Senilai (Rp5.183.915.276,00).

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk dan transfer keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Senilai (Rp0,00).

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Senilai Rp0,00

Ekuitas Akhir
Rp2.928.072.224,00

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.671.968.494,00 dan Rp2.800.020.358,00

*Pengungkapan lain
lain*

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor SK KPA KEP.21/MEN-KP/KU.611/2024 perubahan kelima puluh atas keputusan menteri Kelautan dan perikanan nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan kuasa pengguna anggaran pada satuan kerja Pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan dengan rincian sebagai berikut :

Kuasa Penguana Anggaran: Luthfi Assadad, S.Pi, M.Si

2. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/BRSDM-BRPL/TU.110/I/2024 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Balai Riset Perikanan Laut dengan rincian sebagai berikut :

Pejabat Pembuat Komitmen : Abdul Azim, ST

Pejabat Penandatangan/Penguji SPM : Nurainun Muchlis, S.Pi, M.Sc

3. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 72/BRSDM_BRPL/KU.110/VI/2024 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Balai Riset Perikanan Laut dengan rincian sebagai berikut :

Bendahara Pengeluaran : Amir, S.I.P

Rekening Pemerintah

F.1.1. REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional dari Satker Balai Riset Perikanan Laut adalah Bank BNI Cabang Jakarta Kota A/C 0589680971 a.n. BPG175.BALAI RISET PERIKANAN LAUT dengan Nomor NPWP 000.011.411.6-041.000. Rekening Virtual dengan nomor rekening virtual 9891244038221000 a.n BPG175 BALAI RISET PERIKANAN LAUT

Revisi DIPA

F.1.2. PENJELASAN REVISI DIPA

Sepanjang tahun 2024 BRPL Jakarta telah melakukan Revisi Dipa Sebanyak 10 kali dengan Rincian sebagai berikut :

Revisi ke	Tanggal DIPA	Keterangan
Revisi 1	29 januari 2024	Revisi Kewenangan DJA Blokir Automatic Adjusment : Terdapat blokir anggaran AA sebesar Rp.125.000.000,00 dari kegiatan manajerial
Revisi 2	19 Februari 2024	Revisi Perubahan Rencana Penarikan Triwulan I Pada Halaman III DIPA
Revisi 3	1 April 2023	Pemutakhiran Data Setelah Revisi POK Kewenangan KPA
Revisi 4	3 April 2024	Revisi Antar Kanwil DJPB, Transfer Pagu Anggaran Honor PPNPN ABK KR Bawal Putih III ke BPPP Ambon sebesar

		Rp.418.212.000,00 Pagu anggaran Berubah Menjadi Rp.5.571.946.000,00
Revisi 5	3 Juni 2024	Revisi Perubahan Rencana Penarikan pada Halaman III DIPA Periode Triwulan II. Pagu Anggaran Tetap.
Revisi 6	12 Juli 2024	Revisi Perubahan Rencana Penarikan pada Halaman III DIPA Periode Triwulan III. Pagu Anggaran Tetap.
Revisi 7	7 Oktober 2024	Revisi Perubahan Rencana Penarikan pada Halaman III DIPA Periode Triwulan IV. Pagu Anggaran Tetap.
Revisi 8	5 November 2024	Revisi Pergeseran Anggaran Lingkup BPPSDMKP Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai Lingkup BPPSDMKP. Terdapat Pegurangan Pagu Sebesar Rp.
Revisi 9	26 November 2024	Revisi Anggaran Pergeseran antar jenis belanja dalam rangka memenuhi kekurangan belanja pegawai. Pagu Anggaran tetap.
Revisi 10	11 Desember 2024	Pemutakhiran Data POK Setelah Revisi Kewenangan KPA

To do List

F.1.3. PENJELASAN TO DO LIST APLIKASI SAKTI

Terdapat 1 transaksi yang masih menjadi catatan pada menu to do list pada aplikasi SAKTI. Keterangan pada catatan tersebut berupa : ketiksesuaian akun vs kode

barang aset tetap/BMN. Dengan rincian sebagai berikut:

SEMULA		MENJADI	
Akun	521253	Akun	521253
Kode Barang	5.02.06.05.007	Kode Barang	4.01.01.30.999
Nilai Dokumen	49.000.000	Nilai Dokumen	49.000.000
No SP2D	231751301056328	No SP2D	231751301056328
Nomor Dokumen	B.749/BRPL/PL.760/VI/2024	Nomor Dokumen	B.749/BRPL/PL.760/VI/2024
Tgl Dokumen	27 Juni 2024	Tgl Dokumen	27 Juni 2024

Penjelasan Capaian Output

F.1.4. PENJELASAN CAPAIAN OUTPUT

Terdapat 7 layanan yang merupakan target capaian output BRPL tahun 2024 yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.5.191.946.000,00. Adapun realisasi capaian output hingga 31 Desember 2024 adalah sebesar 100 % dengan realisasi anggaran sebesar 99,8% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Target	Satuan	Realisasi RO	%
1	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	34.037.000	33.828.300	1	Layanan	1	100
2	Layanan Umum	43.200.000	43.052.006	1	Layanan	1	100
3	Layanan Perkantoran	5.016.509.000	5.009.804.614	1	Layanan	1	100
4	Layanan Manajemen SDM	6.000.000	5.700.000	1	Layanan	1	100
5	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	32.000.000	31.804.171	1	Layanan	1	100
6	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	21.500.000	21.323.918	1	Layanan	1	100
7	Layanan Manajemen Keuangan	38.700.000	38.402.966	1	Layanan	1	100

